

SKRIPSI
KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IMAM BONJOL
PADANG

(Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG)

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Di Fakultas Hukum Universitas Andalas



Oleh :

M. Sakti Tegar Eka Putra

1410111106

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)

Pembimbing :

Apriwal Gusti S.H

Iwan Kurniawan, S.H., M.H

Fakultas Hukum
Universitas Andalas

Padang

2018

**KAJIAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
PENGADAAN TANAH KAMPUS III IAIN IMAM BONJOL PADANG**

(Studi Kasus Perkara Nomor 27/Pid.Sus/TPK/2016/PN-PDG)

(M. SAKTI TEGAR EKA PUTRA, 1410111106, Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 65 Halaman, 2018)

ABSTRAK

Pembangunan merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan negara. Dalam melakukan pembangunan tentunya negara memerlukan tanah dan agar tanah tersebut dapat digunakan tentu perlu dilakukan pengadaan. Dalam proses pengadaan tanah, kerap kali kita mendengar kasus korupsi yang menyelimutinya. Dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian tentang kasus pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang yang menyeret Mantan Wakil Rektor II IAIN Imam Bonjol Padang, Prof. Salmadanis ke ranah hukum pidana. Pada penulisan ini terdapat 2 rumusan masalah yang akan dibahas, pertama apakah perbuatan terdakwa terkait dengan pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum? Dan yang kedua, Apakah terdakwa dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam kasus tindak pidana korupsi pengadaan tanah Kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tersebut? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Undang-Undang (*Statuta Approach*), dimulai analisa terhadap putusan hakim, pasal-pasal dalam peraturan yang mengatur permasalahan kemudian dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti. Teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan wawancara, kemudian dianalisis secara kualitatif. Sifat penelitian yang digunakan adalah bersifat deskriptif analitis. Dari hasil penelitian penulis dapat simpulkan bahwa putusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang yang menyatakan terdakwa terbukti bersalah dinilai tidak tepat, karena perbuatan terdakwa dalam kasus tindak pidana korupsi diatas tidak memenuhi unsur melawan hukum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Implikasinya apabila salah satu unsur tindak pidana tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan. Disisi lain jika kita mengkaji putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Padang tersebut dengan teori pemisahan tindak pidana dengan pertanggungjawaban pidana, maka terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban, karena hal tersebut tidak menjadi tanggungjawab terdakwa sebagai Ketua panitia pengadaan tanah, tetapi itu merupakan tanggungjawab dari panitia pengadaan barang dan jasa.